

**KONSTITUSIONALITAS PELIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
(TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023)**

SKRIPSI

Oleh:

Agung Tri Wicaksono

NIM 05020421022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Tri Wicaksono
NIM : 05020421022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Konstitusionalitas Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2024
Saya yang menyatakan,



Agung Tri Wicaksono
NIM. 05020421022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

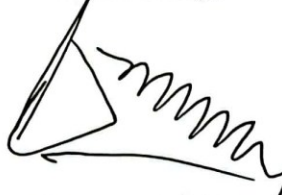
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Agung Tri Wicaksono
NIM. : 05020421022
Judul : Konstitusionalitas Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah (Telaah
Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada Munaqosah Skripsi

Surabaya, 25 November 2024

Pembimbing,



Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.
NIP. 198311132015031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Agung Tri Wicaksono

NIM. : 05020421022

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



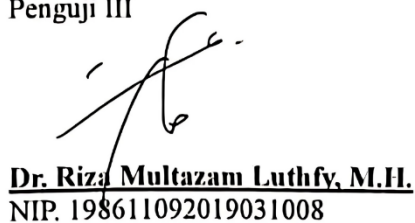
Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji II



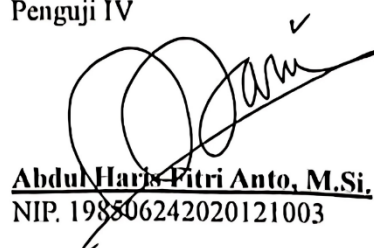
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.
NIP. 198806242020121003

Surabaya, 09 Desember 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agung Tri Wicaksono

NIM : 05020421022

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara

E-mail address : Agungren1745@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :

KONSTITUSIONALITAS PELIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH (TELAAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Januari 2025

Penulis



(Agung Tri Wicaksono)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana lembaga eksekutif juga turut diberi kewenangan legislasi pada tingkat nasional. Dalam sistem ini, Peraturan Pemerintah (PP) merupakan instrumen hukum yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Presiden, tanpa pelibatan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme penyusunan PP, khususnya di sektor keuangan. UU ini mengharuskan adanya konsultasi dan persetujuan DPR dalam proses penyusunan PP, yang sebelumnya merupakan hak prerogatif eksekutif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang juncto Undang-Undang 13 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis legalitas pelibatan DPR dalam penyusunan PP serta membandingkannya dengan praktik di negara-negara presidensial lain seperti Brazil dan Argentina. Analisis juga dilakukan menggunakan perspektif fiqh siyasah melalui konsep Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi sebagai analogi peran legislatif dalam sistem pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan DPR dalam penyusunan PP berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip delegasi pembentukan peraturan yang diberikan secara limitatif kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam sistem presidensial. Pelibatan DPR dalam menyusun PP juga menimbulkan potensi hambatan birokratis dan inefisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip konstitusi dan efisiensi tata kelola di Indonesia.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa langkah penting untuk perbaikan, antara lain: pertama, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan menghapus ketentuan mengenai mekanisme konsultasi dan persetujuan DPR dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah; kedua, mendorong DPR untuk melakukan legislative review guna mengubah Undang-Undang tersebut, khususnya yang terkait dengan mekanisme konsultasi dan persetujuan DPR dalam penyusunan Peraturan Pemerintah; ketiga, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap 11 pasal yang mengatur mekanisme tersebut, apabila DPR tidak segera menindaklanjuti permintaan legislative review; dan keempat, memulihkan kewenangan penuh pemerintah dalam penyusunan Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian	16
H. Definisi Operasional	19
I. Metode Penelitian	22
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN LEGITIMASI PEMBENTUKAN PERATURAN	30
A. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	30
B. Teori Delegasi Kekuasaan (<i>Delegation Of Power</i>)	53
C. Teori <i>Checks and Balances</i>	62
D. Konsep <i>Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi</i>	65
BAB III KONSTITUSIONALITAS PELIBATAN DPR DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH	73
A. Analisis Pelibatan DPR dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Berdasarkan Perspektif Konstitusional	73

B. Tinjauan <i>Ratio Legis</i> terhadap Pelibatan DPR dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	93
BAB IV RELEVANSI KONSEP <i>AHLU-HALLI WA AL-'AQDI</i> DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN.....	107
A. Persamaan Fungsi dan Peran Antara <i>Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi</i> dan DPR dalam Bidang Konsultasi dan Pengawasan	108
B. Perbedaan Wewenang Antara <i>Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi</i> dan DPR dalam Bidang Legitimasi Hukum dan Kedudukan	113
C. Perbedaan Antara <i>Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi</i> dan DPR dalam Bidang dalam Pengangkatan dan Keanggotaan.....	113
D. Perbedaan Antara <i>Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi</i> dan DPR dalam Bidang Hubungan dengan Eksekutif	118
BAB V PENUTUP	122
A. Simpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	131
KARTU TANDA MAHASISWA	131
TRANSKRIP NILAI SEMENTARA	132
HASIL TURNITIN.....	133
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	134
SURAT KESEDIAAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	135
PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR	136
PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL	137
PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	138
KARTU KONSULTASI.....	139
PENDAFTARAN MUNOQOSAH SKRIPSI	140
BIOGRAFI PENULIS	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konstitusi Negara Indonesia, Argentina, dan Brazil.....	91
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab Khallaf. *Terjemah Kitab Al-Siyasah Al-Syar'iyah Aw Nizham Al-Dawlah Al-Islamiyah Fi Syu'un Al-Dusturiyyah Wa Al-Kharijiyyah Wa Al-Maliyah*. Al-Qahirah: Mathaba'ah alTaqaddum, 1997.
- Adji Samekto, F. X., and Aga Natalis. "Exploring the Grundnorm Dilemma: Can Pancasila Be Considered the Grundnorm in the Context of 'the Pure Theory of Law'?" *Journal of Philosophical Investigations* 18, no. 48 (2024): 319–338.
- Airlangga, Shandi Patria. "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis." *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 1.
- Al-Mawardi. *Terjemah Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah Wa Al-Wilayah Ad-Diniyyah*. Mesir: Dar al-fikr, 1996.
- Alfauzi, Ro'is, and Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020): 111–133.
- Altavilla, Cristian. "Las Facultades de Legislación de Los Poderes Ejecutivos Provinciales de La Argentina." *Desarrollo Económico* 59, no. 227 (2019): 83–112.
- Amaluddin, Zainal. "Sistem Bikameral Di Indonesia Sebagai Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Perspektif Masalah." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 7, no. 1 (2021): 36–49.
- Amin, Rizal Irvan, and Achmad. "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia." *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 205–220.
- Aminah, Siti. "Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 3193–3204.
- Anggono, Bayu Dwi. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1 (2018): 1–9.
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Yayat Sri Haryati. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- . *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2018.
- Araujo, Edmir Netto de. *Curso de Direito Administrativo*. 3rd ed. Sao Paulo: Saraiva, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edited by Muchamad Ali Safa'at and Pan Muhammad Faiz. II. Vol. 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Buku Ilmu Hukum Tata Negara*. Vol. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- . *Perihal Undang-Undang*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Assyayuti, Mazdan Maftukha. “Perbandingan Konsepsi Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Teori Kenegaraan Islam Dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern.” Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Casás, José O. *Derechos y Garantías Constitucionales Del Contribuyente*. Buenos Aires, 2005.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, and Vera Bararah Barid. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang- Undangan Di Indonesia*. Edited by Purwaningdyah Murti Wahyuni. 1st ed. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2016.
- Crime, Corruption. “Government Administration Law and Corruption Crime” 02, no. 1 (2021): 45–60.
- Darusman, Yoyon Mulyana. “Pancasila As The Fundamental Norm In The Unity State Of The Republic Of Indonesia (The Theortically Study Legal Hierarchy by Hans Nawiasky).” In *Prosiding IConSHEL Universitas Andalas*. Tangerang: Universitas Andalas, 2018.
- David tan. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–1336.
- DPR, Humas. “Tentang Komisi XI DPR.” Last modified 2024. Accessed November 7, 2024. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-XI>.
- Erickatama, A. “Problematisasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden.” *Grondwet* 2, no. 2 (2023): 224–237.
- Fadli, Moh. *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. 1st ed. Malang: UB Press, 2011.
- Fakhry Amin, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, et al. *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. Edited by Anik Iftitah. *Muhammadiyah Law Review*. Vol. 2. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2018.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Edited by Muhammad Shuhufi. Gowa: Pusaka Almaila, 2015.
- Fernanda, Shaufi. “Dinamika Peran Dan Kedudukan Dprd Sebagai Lembaga Legislatif Daerah Dalam Konsep Otonomi Daerah Perspektif Ahlul Halli Wal Aqdi.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO, 2020.
- Filho, José dos Santos Carvalho. *Manual de Direito Administrativo*. 18th ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris Editora, 2007.

- Gabriel, Ivana Mussi. "Poder Regulamentar No Sistema Jurídico Brasileiro." *Justicia Brazil*. Last modified 2009. Accessed December 7, 2024. https://jus.com.br/artigos/13119/poder-regulamentar-no-sistema-juridico-brasileiro#google_vignette.
- Gordillo, Agustin. "Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas." *Fuentes Nacionales del Derecho Administrativo* VII, no. 11 (2013).
- Hadi Mousavi, Majid Davoudi Nasr. "Hans Kelsen's Thoughts about the Law and Its Relevance to Current Legal Developments." *Technium social sciences journal* 6, no. December (2020): 101–105.
- Huda, Muhamad Nurul. "Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Serta Relevansinya Pada Kinerja DPR." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022).
- Husen, Ahmad. "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 70–79.
- Ichwan, Alfian Khairul. "Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah Serta Relevansinya Di Indonesia." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 150.
- Jamil, Arnita. "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 2 (2020): 189–202.
- Jonaedi Efendi. *Sejarah Hukum*. 1st ed. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019.
- Jusuf, Muhamad Baharuddin, and Adara Khalfani Mazin. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25.
- Kansil, Christine S T, Calinka Princess, and Belinda Laapen. "Kewenangan DPR Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 63–68.
- Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah." *Qiyas* 6, no. 1 (2021): 22–36.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Edited by Mac Knigh. 5th ed. New Jersey: The Law Book Exchange Ltd, 2008.
- Locke, John. *Two Treatises on Civil Government*. Vol. 9. G. Routledge and sons, 1887.
- Mahendra, Muhammad Raka. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Muqaranah* 5, no. 2 (2021): 159–172.
- Martínez, Leandro Abel. *La Autonomía de Las Universidades Nacionales En El Sistema Constitucional Argentino. Análisis de Las Competencias y La Jerarquía de Las Normas En Materia de Educación Superior. Derechos En*

- Acción*. Vol. 12, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mello, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 21st ed. Sao Paulo: Malheiros, 2006.
- Montesquieu de Charles. "L'Esprit Des Lois." In *English Edition: De Montesquieu, C. (1949). The Spirit of the Laws*. 1st ed. Garnier Freres, 1875.
- Natalia, S W, and Q Ayuni. "Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Berbagai Konstitusi Di Dunia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1514–1526.
- Nugraha, Satriya. "Legislatif Dan Demokratisasi: Peranan Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Di Indonesia." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 353.
- Parlindungan, Gokma Toni. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 384–400.
- Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. *Direito Administrativo*. 22nd ed. Sao Paulo: Atlas, 2009.
- Prabandani, Hendra Wahanu. "Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 85–108.
- Prianto, Wahyu, Fakultas Hukum, Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Jl Mayor, Jenderal Katamso, Kec Baruga, and Kota Kendari. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 8–19.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Tika Lestari. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Abd. Kahar Muzakkir. *Sustainability (Switzerland)*. 1st ed. Vol. 11. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Redy, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Tarmizi. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68.
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu*

- Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–190.
- Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, and Muhammad Andi Septiadi. “Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia.” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 58–69.
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknis Penyusunan*. Edited by Uji Prastya. 11th ed. Yogyakarta: Kanisius PT, n.d.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah, Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Khulafa Ar Rasyidin*. 2nd ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sahrin, Abu, and Farid Adnir. “Demokrasi Dalam Dunia Islam Perspektif Al-Mawardi.” *Journal Of Human And Education* 4, no. 5 (2024): 81–87.
- Saleh, Muhamad. “Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Universitas Islam Indonesia*. UII, 2020.
- Sanjaya, Dixon, and Daly Erny. “Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan: Perkembangan Pengaturan Dan Peralihan Kewenangan.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 208.
- Sayudi, A, and S Wijaya. “Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Sebagai Delegation of Rule Making Power.” *Jurnal Pelita Ilmu* 16, no. 02 (2022): 130–139.
- Setiadi, Wicipto. *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Yayat Sri Hayati. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. 8th ed. Yogyakarta: Kanisius PT, 2007.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sousa, Freidelino P.R.A. De. “Pelanggaran Kewajiban Penetapan Peraturan Pemerintah Di Indonesia (Studi Atas Pengawasan Dpr Dan Status Keberlakuan Undang-Undang).” Universitas Kristen Satya Wacana, 2013.
- Sugiman. “Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen UUD Nkri 1945.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–182.
- Suhenriko, Muhammad. “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1, no. 2 (2023): 64–71.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasah Konsep, Aliran Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*. Edited by Maman Abd. Djaliel. 2nd ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Suryawati, Nany, Victor Imanuel W. Nalle, Manuel Simbolon, Rian Adhivira

- Prabowo, Putu Bravo Timothy, Fachrizal Affandi, Tody Sasmitha Jiwa Utama, Titon Slamet Kurnia Umbu Rauta, Indirani Wauran, and Martika Dini Syaputri. *Menuju Legalisasi Berkualitas: Pokok Pikiran Untuk Legalisasi Indonesia*. Edited by Nany Suryawati. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. 1st ed. Vol. 7. Surabaya: Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila Universitas Katolik Darma Cendika, 2020.
- Syukur, Iskandar. "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi." *Asas* 11, no. 01 (2019): 49–62.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*. 2nd ed. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Teguh Pamungkas, Jamrizal Jamrizal, and Kasful Anwar Us. "Kepemimpinan Partisipatif, Delegasi, Dan Pemberian Kewenangan." *Jurnal Manajemen Riset Inovasi* 2, no. 2 (2024): 99–110.
- Tim Penyusun. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV, Jilid I. Mahkamah Konstitusi*. Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Edited by Suwito. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- . *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Prenamedia Group, 2017.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Wakhid, Ali Abdul. "Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Sosial dan Humanis Sains* (2017): 1–9.
- Wibowo, Agung Edy. *Metodologi Penelitian*. Edited by Andri Kurniawan, Lastry Forsia, and Nuraini Hery. 1st ed. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Yani, Ahmad. "Analisis Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istibat Hukum Islam)*. UIN Sunan Ampel. Surabaya: UIN SUNAN AMPEL, 2013.
- Zein, M. Harry Mulya, and Sisca Septiani. *Ilmu Administrasi Negara*. Edited by Muhamad Rizal Kurnia. *CV. Pustaka Setia*. Vol. 53. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023.
- "An-Nisa 59." In *Al Qur'an*, n.d.